Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum

Pamungkas Satya Putra^{1*}, Bambang Sutedja¹, Wahyu Utamidewi², Rani Apriani¹,
Nova Rizki Nurhaedi³, Esa Rizal Kurniawan⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Correspondent Email: pamungkas.satya.putra@gmail.com

Article History:

Received: 07-01-2021; Received in Revised: 20-02-2021; Accepted: 01-03-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v4i2.545>

Abstrak

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini, yaitu: Kurangnya sosialisasi hukum berbasis media daring. Sehingga dari hal tersebut masyarakat membutuhkan pendidikan berupa sosialisasi bagaimana menggunakan sosial media dan melakukan perbuatan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Sulitnya penerapan sosialisasi Legal Aid di tengah Pandemi Covid-19 membutuhkan upaya ekstra di dalam pemenuhan kegiatan yang dilakukan tersebut yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2020 di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Dalam program sosialisasi metode yang dilakukan dengan menggunakan meeting online, media sosial melalui Youtube, Instagram dan group WhatsApp Dusun Rawarengas berupa video animasi, video edukasi, video grafis, brosur dan standing banner telah berjalan baik dengan kategori berhasil. Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan Mitra Strategis dan Inti dalam Pelayanan Legal Aid di Kabupaten Karawang. Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan Mitra Strategis dan Inti dalam Pelayanan Legal Aid di Kabupaten Karawang. Dapat terbentuknya sosialisasi terhadap model pelayanan digital guna menunjang Program E-Court dan Kesinergian Antara Praktisi dan Akademisi Hukum di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: Sadar Hukum, Masyarakat, Pendidikan, Berkarakter, Daring

Abstract

Departing from the problems faced in this field, namely the lack of legal socialization based on online media. So from this, the community needs education in the form of socialization on how to use social media and do good and correct legal actions in accordance with statutory regulations, which will not cause new problems in society. The difficulty of implementing the socialization of Legal Aid in the midst of the Covid-19 Pandemic requires extra effort in fulfilling the activities carried out in October-November 2020 in Sukaluyu Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency. In the socialization program, the method used by using online meetings, social media via Youtube, Instagram, and the WhatsApp group of Dusun Rawarengas in the form of animated videos, educational videos, graphic videos, brochures, and standing banners has gone well with the successful category. Implementation is carried out by

involving Strategic and Core Partners in Legal Aid Services in Karawang Regency. Implementation is carried out by involving Strategic and Core Partners in Legal Aid Services in Karawang Regency. Can form the socialization of the digital service model to support the E-Court Program and the Synergy between Practitioners and Legal Academics in Karawang Regency.

Key Word: Aware of Law, Society, Education, Character, Online

1. Pendahuluan

Hilirisasi Riset *Legal Aid* dengan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibahas ini memberikan tren positif bagi penerapan langsung (secara *direct*) pada masyarakat terkait pelaksanaan *Legal Aid* yang terjadi di masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (yang selanjutnya disebut *Covid-19*). Program tersebut dilakukan atas dasar menguatkan dan peningkatan Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan situasi bantuan hukum yang telah terjadi, dibuatlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum merupakan lembaga bantuan hukum/organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Syarat-syarat lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang dapat disebut sebagai pemberi Pemberi Bantuan Hukum, yaitu : Berbadan Hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut tetap dapat memberikan Bantuan Hukum selama Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode Etik Advokat Pasal 3 menegaskan bahwa kepribadian advokat antara lain: “Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Sementara itu, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diatur bahwa pengacara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya saja dalam aturan berikutnya mereka hanya dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum 50 jam dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi memaksa dari organisasi advokat. Akibatnya, realisasi praktek probono advokat tidak berjalan.

Saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait tata cara pembentukan serta pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
6. SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Mitra PKM saat ini, yaitu: Pusat Bantuan Hukum PERADI Karawang belum memiliki Syarat Akreditasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang perlu untuk ditindaklanjuti agar pola pendampingan dan pelaporan kinerja dapat berbasis pada standardisasi yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sulitnya penerapan Sosialisasi *Legal Aid* di tengah Pandemi Covid-19 membutuhkan upaya ekstra di dalam pemenuhan kegiatan yang dilakukan tersebut yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2020 di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan Mitra Strategis dan Inti dalam Pelayanan *Legal Aid* di Kabupaten Karawang. Dengan adanya wabah virus Covid-19 maka Sosialisasi dilakukan secara daring di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan tema “Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum di Kabupaten Karawang” diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dalam upaya pencegahan dalam perilaku perbuatan melawan hukum.

Optimalisasi kinerja pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum juga tentunya telah banyak menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, (hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja);
2. Faktor penegak hukum, (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan).

5. Faktor kebudayaan, (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup) (Soekanto, 2021).

Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini, yaitu:

1. Efektivitas: Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai (Sedarmayanti, 2009).
2. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum: Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah sebuah wadah atau organisasi bantuan hukum yang memberikan jasa atau pelayanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
3. Pemberi Bantuan Hukum: Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum (Nasution, 1988).
5. Tindak Pidana. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 1993).

Memahami bagaimana kepastian hukum itu harus dijadikan pegangan dalam hal ini digunakan pendapat Gustav Radbruch, diman kepastian hukum adalah “*scherkeit des rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan maksud dari kepastian hukum, diantaranya (Ali, 2010), bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan “Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum” ini menerapkan metode pembelajaran pengalaman (*experiential learning*) dalam meningkatkan literasi bagi masyarakat (Didiharyono & Qur’ani, 2019). Metode ini merupakan suatu proses refleksi dan relaksasi terhadap pengalaman yang menimbulkan gagasan atau pengetahuan baru. Dalam hal ini masyarakat yang mengikuti kegiatan dapat secara intens berdiskusi dan saling bertukar informasi untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang kerap ditemui selama ini dalam kehidupan sehari-hari, mengungkap permasalahan serta ide-ide mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemberian informasi dari nara sumber telah ikut

menambah wawasan peserta. Dari proses ini peserta kegiatan akan membentuk konsep-konsep abstrak yang kemudian dicobakan pada berbagai situasi baru (konstruksi), sehingga memberikan suatu pengalaman baru lagi bagi individu, demikian seterusnya proses pembelajaran berlangsung, seperti sebuah siklus (Achmat, 2006).

Peran nara sumber dalam kegiatan menggunakan model *experiential learning*, merupakan optimalisasi peran nara sumber sebagai fasilitator, yang berfungsi sebagai pengarah dan perancang pengalaman belajar mengajar. Nara sumber harus dapat melakukan kolaborasi dan mengkondisikan situasi supaya proses belajar peserta agar dapat terfasilitasi. Peserta pelatihan memperoleh pengalaman baru atau terbantu menata pengalamannya di masa lampau dengan cara baru (Achmat, 2006).

Program pelatihan ini lebih banyak melibatkan aktifitas peserta melalui diskusi daring, tanya jawab, *brainstorming*, observasi, dan lainnya. Pelibatan peserta secara aktif ditujukan supaya peserta tidak bosan dan tidak merasa digurui (Fowlie & Wood, 2009; Fowlie, J., 2000). Dalam menjamin keberlanjutan program, telah dilakukan kerja sama yang intens dan komunikatif dengan Pemerintahan Desa Sukaluyu serta perangkat desa lainnya guna menunjang setiap kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut didasarkan pada pola pendekatan optimalisasi bagi peran serta masyarakat desa tersebut agar kegiatan mencapai tujuan dalam menciptakan masyarakat sadar hukum pada Desa Sukaluyu.

Program ini diharapkan menjadi agenda rutin pada tahun-tahun selanjutnya. Masyarakat dituntut lebih sadar akan hak dan kewajiban khususnya terhadap perbuatan yang dapat dikategori sebagai melawan hukum dan dapat memberikan informasi lanjutan *Training or Trainers* kepada masyarakat lainnya di Desa Sukaluyu dan sekitarnya.

Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menciptakan Masyarakat Sadar Hukum merupakan program rutin yang dilakukan PKBH (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang) bermitra dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Karawang. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan metode Daring akibat adanya Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan Protokol Kesehatan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya sosialisasi dilakukan terjun secara langsung ke masyarakat sebagai bentuk advokasi langsung.

Sosialisasi dilakukan dengan metode Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta pengoptimalan media daring dengan menggunakan aplikasi yang tersedia pada *Google Playstore*. Pengemasan sosialisasi dikombinasikan dengan beberapa sosial media *Youtube*, *Whatsapp*, dan *Instagram* pada tanggal 15 Oktober 2020 mempublikasikan hasil video animasi yang kami buat mengenai “pengenalan hukum secara mendasar” ke group WhatsApp RT. 1 Dusun Kalipandan Desa Sukaluyu, selain itu juga mempublikasikan melalui akun Instagram (kkn_unsika34) dan *channel YouTube* (KKN UNSIKA 2020 [34]) pribadi dari kelompok KKN 34 dengan laman Video 1:

<https://www.youtube.com/watch?v=21DAXBDWfhw> dan Video 2:
https://www.youtube.com/watch?v=_9OQy9N1is0.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Daerah meletakkan hukum sebagaimana fungsinya, yaitu: Pemerintah harus membuat norma hukum yang dapat memberikan solusi atas permasalahan baru yang muncul akibat pandemi ini. Hendaknya norma baru menimbulkan unsur timbal-balik dan mempunyai keterikatan terhadap perilaku baik oleh masyarakat maupun pemerintah, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembangnya dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial.

Tabel 1. *Data Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Ket.
1	Anak Terlantar	15	
2	Anak Nakal	6	
3	Anak Jalanan	—	
4	Lansia Terlantar	5	
5	Pengemis	2	
6	Gelandangan	2	
7	Pekerja Sek Komersial	—	
8	Eks Narapidana	7	
9	Penyandang cacat	23	
10	Keluarga Miskin Sosial	322	
11	Keluarga Barmasalah Sosial Psiklg	7	
12	Keluarga Rumahnya Tidak Layak Huni	33	
13	Korban NAPZA	—	
14	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	21	
15	Pemulung	17	
16	Janda PKRI	2	
17	Lainnya	42	

Sumber: <https://pemdestdesasukaluyu.com/>

Menurut data hasil Suseda 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja di Desa Sukaluyu mencapai 20%, jika dilihat berdasarkan perspektif jender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 25 % terdapat ketimpangan yang sangat tajam dalam pasar kerja, di mana perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja dan laki-laki lebih diprioritaskan. Mengenai dampak ketenagakerjaan terhadap pendapatan rumah tangga dampaknya sangat luas terhadap kemiskinan, karena kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga.

Mengingat sangat sempitnya lapangan pekerjaan para pencari kerja lebih memilih mencari pekerjaan di luar daerah, seperti di Jakarta dan di kota atau daerah lain baik di dalam maupun di luar pulau Jawa bahkan di luar negeri sebagai TKI dan TKW. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pencari kerja selalu bertambah, sedangkan penyerapan tenaga kerja sangat terbatas.
2. Pencari kerja/penganggur pada umumnya; Berpendidikan rendah dan Keterampilan rendah.

Kegiatan dilaksanakan menggunakan media daring dilaksanakan selama 60 hari. Peserta sosialisasi merupakan sejumlah perwakilan warga RT 1 Kalipandan dan masyarakat yang tertarik serta dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa dalam pengintegrasian dengan beberapa media sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dengan memanfaatkan sosial media *Youtube* dan *Instagram* terkait Masyarakat Sadar Hukum. Kegiatan pengabdian ini sudah berjalan 100% dari keseluruhan kegiatan. Adapun beberapa Kegiatan yang telah dilakukan bersama mahasiswa KKN34 sebagai berikut:

1. Sosialisasi Secara Mendasar Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,

Gambar 1. Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Desa Sukaluyu Di Era New Normal Berupa Brosur

Bekerjasama dengan pihak Pemerintahan Desa Sukaluyu untuk mengenalkan hukum secara lebih luas agar menciptakan masyarakat Desa Sukaluyu sadar akan hukum.

Tabel 2. Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Desa Sukaluyu di Era New Normal

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Jenis Kegiatan	Sosialisasi
Tujuan	Meminimalisir penyebaran virus corona dan membuat masyarakat tidak menyepelekan atau tidak memandang sebelah mata Covid-19.
Mitra/Sasaran Kegiatan	Masyarakat Dusun Kalipandan Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
Kontribusi Pihak Lain	KPBH LPPM dan PBH DPC PERADI KARAWANG
Metode dan Tahapan Kegiatan	Pada awalnya kami mengumpulkan bahan materi mengenai protokol kesehatan terlebih dahulu, kemudian dirangkum ke dalam bentuk power point yang nantinya akan menjadi bahan untuk pembuatan brosur. Pada tanggal 4 November 2020 mempublikasikan hasil brosur yang kami buat mengenai “protokol kesehatan” ke group WhatsApp RT 1 Dusun Kalipandan Desa Sukaluyu, selain itu juga mempublikasikan melalui akun Instagram (kkn_unsika34) pribadi dari kelompok KKN 34. Kemudian hasil outputnya berupa brosur mengenai protokol kesehatan yang akan diserahkan ke pihak Desa Sukaluyu.
Hasil yang Dicapai	Adanya kesadaran bagi masyarakat Desa Sukaluyu akan pentingnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika berada di luar rumah, melakukan <i>social distancing</i> , membiasakan untuk selalu cuci tangan dan lain sebagainya.
Hambatan dan Solusinya	Hambatannya karena dilakukan secara daring maka dalam sosialisasi kurang maksimal, untuk mempublikasinya hanya melalui <i>meeting online</i> , <i>group WhatsApp</i> warga RT 1 Kalipandan, dan akun Instagram serta kurangnya antusias dari masyarakat. Solusinya dalam <i>group WhatsApp</i> tersebut terdapat Kepala Dusun Kalipandan yang nantinya akan membagikan file brosur ke <i>group</i> atau kontak masyarakat Desa Sukaluyu sebagai Duta Desa Dasar Hukum Sukaluyu.

2. Pengenalan Hukum Secara Mendasar di Desa Sukaluyu.

Gambar 2. Pengenalan Hukum Secara Mendasar di Desa Sukaluyu Berupa Video Animasi

3. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Gambar 3. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa brosur

Meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen dengan cara mensosialisasikan tentang perlindungan konsumen lebih maksimal lagi dengan dibantu oleh Pemerintahan Desa Sukaluyu.

4. Sosialisai Mengenai *Legal Aid* (Layanan Bantuan Hukum),

Gambar 4. Sosialisasi Mengenai *Legal Aid* (Layanan Bantuan Hukum) berupa brosur

Bekerjasama dengan pemerintah desa Sukaluyu agar masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan hukum tanpa harus memikirkan mengenai pembiayaan hingga masalah hukumnya selesai.

5. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Gambar 5. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa brosur

Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai pemberian edukasi dan kesadaran tentang pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga kepada masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di masyarakat Desa Sukaluyu,

Gambar 6. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Masyarakat Desa Sukaluyu berupa standing banner

Menedukasi lebih dalam mengenai apa saja hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Gambar 7. Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa brosur

Memberikan pengetahuan dan wawasan lebih mendalam kepada masyarakat Desa Sukaluyu akan aturan bersosial media dengan baik.

8. Sosialisasi Hukum Bahaya Narkotika dan Kenakalan Remaja,

Gambar 8. Sosialisasi Hukum Bahaya Narkotika dan Kenakalan Remaja berupa brosur

Mengedukasi masyarakat khususnya remaja karena sebagai penerus bangsa agar tidak menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya.

9. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah,

Gambar 9. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah berupa video edukasi

Diharapkan masyarakat Desa Sukaluyu lebih disiplin agar tidak membuang sampah sembarangan, menegur apabila ada yang melanggar, dan mengolah kembali sampah yang masih bisa di daur ulang.

10. Pengenalan Profil Desa Sukaluyu,

11. Sosialisasi Mengenai Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas.

Gambar 10. Sosialisasi mengenai Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas berupa brosur

4. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan tersebut, fakta menjelaskan pola metode pengabdian kepada masyarakat dinilai telah optimal dan efektif dalam memberikan pandangan dan kesadaran hukum yang berbasis pada media online atau melalui pendekatan daring. Desa Sukaluyu merupakan desa yang berkembang dengan didukung oleh letak geografis yang dekat dengan pusat perkotaan Kabupaten Karawang sebagai Bagian Dari Kawasan Industri Terbesar Se-Asia Tenggara, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya Desa Sukaluyu, masih belum optimal dalam melakukan pendidikan berkarakter guna menjadi Desa Sadar Hukum melalui bentuk kegiatan seperti sosialisasi mengenai sadar hukum, sosialisasi tentang narkoba, perlindungan konsumen, layanan bantuan hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah membantu masyarakat Desa Sukaluyu dalam hal meningkatkan pendidikan mengenai masyarakat yang sadar akan hukum di Kabupaten Karawang. Semakin meningkatnya korban Virus Covid-19 di setiap daerah di Indonesia dengan melakukan kegiatan program kerja utama mengenai “Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum” guna menciptakan desa-desa Sadar Hukum yang ada di setiap pelosok negeri.

5. Ucapan Terimakasih

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Singaperbangsa Karawang melalui LPPM atas bantuan dana hibah pengabdian tahun 2020, dan juga kepada Mitra (Pemerintahan Desa Sukaluyu, PBH DPC PERADI Karawang, PKBH, LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang, Pihak UMKM dan lainnya), serta Fakultas Hukum yang sangat mendukung kegiatan “Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum”.

6. Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmat, Z. (2006). Efektifitas Pelatihan Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Mahasiswa Baru UMM Tahun 2005/2006. *Humanity*, (1)2, 117–121.
- Azrai, E. P., Suryanda, A., & Rini, D. S. (2020). Peningkatan Keterampilan Guru IPA Dalam Pengembangan Sumber Belajar Mandiri Sebagai Sarana Belajar Siswa. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 53-65. <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v3i2>.
- Azrai, E. P., Hariyanto, E., Sunaryo, T., & Hisyam, C. J. (2020). Pelatihan Peningkatan Kompetensi Mengajar Bagi Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak

- (LPKA) Tangerang, Banten. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 36-46. <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v3i1>.
- LPPM Unsika. (2020). *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Universitas Singaperbangsa Karawang*. Karawang: LPPM.
- Didiharyono, D., & Qur'ani, B. (2019). Increasing Community Knowledge Through the Literacy Movement. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-24. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v2i1.235>.
- Fowlie, J., & Wood, M. (2009). *The emotional impact of leaders' behaviours*. *Journal of European Industrial Training*. (33)6, 559–572. <https://doi.org/10.1108/03090590910974428>.
- Hehanussa, Deassy J.A., & Salamor, Yonna B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *SABDAMAS: Prosiding Universitas Atma Jaya*, (1)1, 293-297.
- Pemerintahan Desa Sukaluyu. (2020. September 30) *Profil Desa*. Diakses dari <https://pemdesdesasukaluyu.com>.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisru, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v2i1>.
- Mertokusumo, S. (2018, Oktober 16). *Meningkatkan Kesadaran Hukum*. Diakses dari <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/meningkatkankesadaran-hukum-masyarakat.html>.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Musjtari, D.N. (2018). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *ABDIMAS*, 2(22), 151-160.
- Oprasmani, E., Amelia, T., & Muhartati, E. (2020). Membangun Masyarakat Peduli Lingkungan Pesisir Melalui Edukasi Kepada Masyarakat Kota Tanjungpinang Terkait Pelestarian Daerah Pesisir. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 66-73. <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v3i2>.
- Richard, M. S. (1985). *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan: Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Negeri Seilale. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 70-73.
- Sarwono, B. (2017). *Kesadaran Hukum Perlu dibangun dari Keluarga*. Banjarnegara: Suara Merdeka.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sidharta, B.A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

[114] Pamungkas Satya Putra, dkk / *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4; No.2; Agustus, 2021

Soekanto, S.. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7(6), 462-470.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, T., & Nurhadi. (2020). Peningkatan Kemampuan Pengolahan Data Melalui Pelatihan Statistik dan Aplikasi Program SPSS bagi Guru-Guru SMA di DIY. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 31–35. <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v3i1>.